

ETIKA PENDIDIKAN

**Oleh : Drs. P. Priyoyuwono, M.Pd.
email : petrus_priyoyuwono@uny.ac.id**

Pertemuan Ke-1

1. ETIKA DAN PERKEMBANGANNYA

A. Pendahuluan

- Dalam bahasa Inggris ada tiga istilah yaitu *ethic*, *ethical*, dan *ethics*, yang ketiga-tiganya istilah itu sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata etika saja, padahal masing-masing mempunyai arti sendiri-sendiri.

- *Ethic* ialah etika
- *Ethics (singular / tunggal)* = suatu prinsip moral, aturan atau cara berperilaku.
- *Ethics (plural / jamak)* = moral prinsip-prinsip yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi.
- *Ethical* ialah ber-etika atau yang bertalian dengan etika.

- Kata *ethic* berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu
 - 1) *Ethos = Characteristic spirit, as of a people; yaitu the moral factor which influences a man's action* (faktor moral yang mempengaruhi perbuatan orang)
 - 2) Ethikos = penggunaan karakter, kebiasaan, kecenderungan dan sikap.

Jadi secara etimologi ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat istiadat.

'Etika pendidikan, yaitu ilmu atau pelajaran etika, mengenai teori bagaimana seharusnya berperilaku atau berbuat dan tidak berbuat terhadap orang lain, khususnya dalam praktik pendidikan.

Etika pendidikan berisi aturan perilaku yang diterima secara sosial yang memberi tekanan pejabat-pejabat pendidikan untuk memelihara kesadaran nilai yang tinggi dan jujur serta adil dalam memberi layanan kepada publik.

B. Timbulnya Etika

Etika timbul di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya adanya etika dalam praktik itu karena adanya kehidupan bersama antara orang dengan orang, atau karena manusia itu hidup bermasyarakat. Jika seorang manusia hidup sendirian, dan sama sekali tidak berhubungan dengan seorang manusia pun, maka di sana bagi seseorang yang hidup sendirian itu tidak ada persoalan etika.

- ❑ Namun, dalam kenyataannya orang atau manusia itu tidak dapat hidup sendirian. Hal ini mulai terjadi sejak manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan, sebagaimana tersebut di dalam kitab Injil (Surat Kejadian 2 : 12), sesudah Adam diciptakan sendirian, dan waktu itu Adam sedang tidur, bersabdalah Tuhan : “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja...” dan diciptakanlah (Hawa) yang diambil dari tulang rusuk Adam, menjadi manusia perempuan pertama kali untuk menemani Adam dan sekaligus menjadi isterinya sebagai teman hidup.

Sejak adanya Adam dan Hawa itu beranak-pinaklah manusia hingga sekian banyaknya sekarang ini. Jika misalnya ada orang yang mengatakan bahwa si A atau si B itu hidup sendirian, itu tidak benar karena ia tentu pernah hidup dengan orang lain, apakah dengan ibunya, bapaknya, atau orang lain. Yang pasti ia tentu pernah hidup dengan ibunya, karena ia dilahirkan dan dipelihara atau diasuh pada awalnya oleh ibunya, atau dilahirkan oleh ibunya, tetapi mungkin diasuh oleh orang lain. Jika tidak, ia pasti mati.

Sejak adanya Adam dan Hawa itu etika sudah ada, yaitu berupa perintah-perintah Tuhan mengenai apa yang diperbolehkan (sebagai hal yang baik) untuk dilakukan dan apa yang dilarang (sebagai hal yang tidak baik atau dosa) untuk tidak diperbuat, tetapi mereka tidak menyadari dan tidak mempersoalkannya, bahwa yang baik dan buruk itu disebut sebagai etika. Nyatanya mereka makan buah kuldi.

C. Definisi Etika

Mendefinisikan etika tidak mudah, karena etika dapat dipandang dari berbagai sudut atau dimensi. Di samping itu, definisi selalu berkembang menurut perkembangan zaman. Definisi yang paling sederhana : **“Etika ialah perilaku sebagai cerminan moral, perangai atau watak, sebagai hal yang baik atau tidak baik, dikaitkan dengan martabat manusia, kemanusiaan, atau nilai-nilai sebagai manusia.”**

Dapat juga etika didefinisikan sebagai **“Nilai-nilai atau norma-norma perilaku yang baik atau tidak baik yang dilakukan oleh seseorang atau kumpulan orang baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain yang dikaitkan dengan martabat manusia, kemanusiaan, atau nilai-nilai sebagai manusia.”**

D. Etika dan Moral

Etika ialah apa yang telah didefinisikan tersebut di atas. Etika sebagai nilai-nilai atau sebagai norma-norma tentang perilaku, apa yang baik (etis) dan apa yang buruk (tak-etis). Namun, perilaku tidak hanya sekadar perilaku, tetapi digerakkan oleh moral, perangai, watak, atau kehendak manusianya. Maka etika juga dapat disebut sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral manusia.

Oleh sebab itu perilaku manusia yang baik terhadap martabat manusia, dikatakan bahwa manusianya bermoral atau etis, sedangkan manusia yang perilakunya tidak baik terhadap martabat manusia dikatakan tidak etis atau tidak bermoral. Jadi, (tidak) etis sama saja dengan (tidak) bermoral.,

E. Martabat Manusia

- Yang dimaksud dengan martabat manusia ialah nilai, mutu, drajad, atau kemuliaan sebagai manusia atau yang melekat pada manusia. Manusia ialah makhluk tertinggi di dunia yang dapat dibedakan dari makhluk-makhluk lain, yang harus dihormati martabatnya. Menghormati martabat manusia adalah etis, sedangkan tidak menghormatinya adalah tidak etis. Etika hanya dikaitkan dengan martabat manusia sebagai mana kodratnya.

Yang termasuk kedalam martabat manusia, antara lain berbentuk hak-hak, yaitu :

1. Hak untuk hidup
2. Hak untuk makan, minum, dan istirahat
3. Hak atas keselamatannya
4. Hak untuk menikah pada waktunya
5. Hak untuk berkumpul (berserikat)
6. Hak untuk mengeluarkan pendapatnya
7. Hak untuk bekerja
8. Hak untuk memperoleh dan mencari kebenaran
9. Hak untuk bergerak
10. Hak untuk tahu (memperoleh pengetahuan)
11. Hak untuk mempercayai sesuatu (agama)
12. Hak untuk tidak sakit (tidak disakiti)
13. Hak untuk memiliki sesuatu

Memberikan kepada seseorang manusia atas hak-haknya tersebut di atas adalah perbuatan etis. Sebaliknya melanggar atau menghilangkan hak-hak tersebut di atas kepada seseorang manusia adalah perbuatan tidak etis, yaitu :

1. Membunuh untuk tidak hidup
2. Melarang makan, minum, dan istirahat pada waktu dibutuhkan
3. Mengancam keselamatannya
4. Melarang menikah pada waktunya
5. Melarang mengeluarkan berpendapat
6. Melarang bekerja
7. Membohongi atau dusta
8. Mengungkung (menyandera)
9. Melarang mencari tahu / pengetahuan
10. Melarang beragama
11. Menyiksa atau menganiaya
12. Merampas atau mencuri milik seseorang

F. Etiket

- Etiket bukan etika. *Etiket ialah* tata cara yang harus dilakukan dalam pergaulan yang ditunjukkan sebagai tanda sopan atau menghormati. Misalnya bagaimana kita harus mengetuk pintu sebagai tamu, bagaimana kita seharusnya duduk, minum, makan, berbicara, bertanya, dan sebagainya.

G. Kapan Timbulnya Etika

Etika dalam arti sekarang ini muncul dalam sejarah yang panjang. Semenjak manusia diciptakan sebenarnya sudah ada etika, tetapi tidak disadari bahwa etika lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. Sesudah manusia diciptakan, menurut Kitab Ijil, Surat Kejadian 2: 16-17 Allah memberi perintah kepada manusia: **“Semua pohon dalam tanah ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati”**

Larangan Allah itu ada kaitannya dengan kemanusiaan, apa yang baik dan apa yang buruk. Menaati larangan Tuhan adalah etis, sedangkan melanggarnya adalah tidak etis. Ini adalah etika yang pertama, yang tidak disadari bahwa itu adalah etika.

Kemudian turun Firman lagi sebagai norma etika ialah Injil, Surat Keluaran 20: 3-16, yaitu :

1. Jangan ada padamu Tuhan selain Allah.
2. Dilarang menyembah patung
3. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan.
4. Istirahatlah (tidak bekerja) pada hari Sabat (Minggu)
5. Hormatilah ayah dan ibumu
6. Jangan membunuh
7. Jangan berzinah
8. Jangan mencuri
9. Jangan mengucapkan saksi dosa
10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini isterinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apa pun yang dipunyai sesamamu.

Selanjutnya dalam Surat Imamat 19 termuat larangan-larangan dalam bentuk :

- Mencuri
- Bohong
- Dusta
- Sumpah dusa
- Memeras
- Merampas
- Menahan upah pekerja
- Mengutuk orang tuli
- Memasang batu sandungan bagi orang buta
- Curang dalam peradilan
- Membela orang kecil tidak sewajarnya
- Memfitnah
- Mengancam
- Membenci
- Menuntut balas
- Dendam

Firman Allah itu diringkas, tetapi menjadi lebih luas artinya, sebagaimana termuat dalam Perjanjian Baru, Surat Matius 22 : 37-40, yang dinyatakan sebagai hukum yang terutama, waktu Yesus menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat: “Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?” Jawab Yesus kepadanya : “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah : Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan Kitab para Nabi.”

Dalam perkembangan sejarah manusia, kemudian timbul norma-norma etika, yaitu berupa anjuran dan larangan yang baik maupun yang buruk, baik yang berasal dari Tuhan maupun yang berasal dari manusia sendiri yang timbul dari kehidupan bersama, yang bertalian dengan segi-segi atau nilai-nilai kehidupan manusia dalam kehidupan bersama (bermasyarakat). Demikianlah norma etika berkembang, sehingga menjadi norma etika yang sekarang, yang kita bicarakan ini. Jadi, etika atau norma-norma etika berkembang dalam kurun waktu yang sudah ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan atau milyaran tahun.

H. Etika Menurut Agama Islam

Berdasarkan kaidah Islam, etika adalah bagian dari akhlak manusia, karena akhlak tidak sekedar menyangkut perilaku yang bersifat lahiriah, tetapi juga mencakup hal-hal yang lebih kompleks yaitu bidang akhidah ibadah dan sariah, dengan pengertian sebagai berikut :

1. Etos menyangkut hubungan manusia dengan kholiknya.
2. Etis mengatur sikap seseorang terhadap dirinya dan hubungannya terhadap orang lain dalam kehidupan sehari-hari.
3. Moral : mengatur hubungan seseorang dengan orang lain.
4. Estetika : rasa keindahan yang mendorong seseorang untuk meningkatkan keadilan dirinya dan lingkungan.

I. Etika Menurut Ajaran Hindu

Ajaran Hindu lebih tua daripada ajaran Budha atau Kristen. Di Indonesia, sebelum kedatangan ajaran Buddha, Islam, dan Kristen, telah ada di sini ajaran Hindu. Etika menurut ajaran Hindu mencakup tiga tingkatan: a) dalam bentuk angan-angan, niat, atau tujuan b) dalam bentuk pekerti, atau perbuatan nyata, dan c) akiat yang ditimbulkan oleh pekerti. Ketiga-tiganya itu harus baik: tujuan baik, pekertinya baik, dan akibatnya pun baik. Tidak boleh (dan tidak etis) jika: (1) tujuan baik, pekertinya jelek, dan akibatnya jelek, (2) tujuan jelek, pekertinya jelek, akibatnya jelek, (3) tujuan jelek, pekertinya baik, akibatnya baik, (4) tujuannya jelek, pekertinya baik, akibatnya jelek, (5) tujuannya baik, pekertinya jelek, akibatnya jelek.

J. Tujuan Etika

Dalam kehidupan bersama antar-manusia diperlukan etika, karena adanya beberapa sebab. Manusia itu mempunyai dua watak atau bakat, watak yang baik dan watak yang buruk. Watak yang baik, misalnya kasih sayang, memberi sesuatu kepada orang lain, jujur, menolong kepada sesama manusia, bekerja sama, dan sebagainya. Watak yang tidak baik, buruk, atau jahat, misalnya dusta, mencuri, dendam, egois, membunuh, memfitnah, dan sebagainya.

Jika tidak ada etika, yaitu norma-norma tentang apa yang wajib dilakukan, dan norma-norma tentang apa yang dilarang untuk dilakukan, maka kehidupan bersama antar-manusia akan kacau. Yang terjadi ialah bukan kerukunan, melainkan menangnya sendiri, seperti serigala memakan serigala dari kelompoknya sendiri. Manusia akan hancur dan punah dengan sendirinya.

Maka diperlukan etika yang tujuannya ialah **supaya manusia hidup tertib, damai, rukun, sejahtera, dan menikmati kehidupan bersama.** Apalagi jika diingat bahwa dalam kenyataannya, tidak seorang pun manusia yang dapat mencukupi sendiri semua kebutuhannya dari sejak lahir hingga mati.

Tiap orang manusia tentu membutuhkan bantuan, pertolongan, atau kerjasama dengan orang lain. Maka etika dalam pergaulan hidup bersama itu sangat diperlukan.

TEORI ETIKA

**Oleh : Drs. P. Priyoyuwono, M.Pd.
email : petrus_priyoyuwono@uny.ac.id**

Pertemuan 2

A. Pendahuluan

Etika Pendidikan adalah penerapan norma-norma etika dalam pendidikan dan sekolah. Teori etika berupa penjelasan atau keterangan mengapa ada etika dan terjadinya etika. Etika bertalian dengan perilaku atau perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk.

Baik dan buruk itu dikaitkan dengan nilai-nilai sebagai manusia atau nilai-nilai kemanusiaan, yang didasarkan atas pikiran yang rasional. Dengan teori etika pendidikan seseorang dapat memberikan kebenaran (*justification*) atau ketidakbenaran dari suatu perbuatan mendidik.

B. Macam-macam Teori Etika

1. TEORI TELEOLOGI

- Mengukur baik-buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuannya.

- Misal :
Seorang anak terpaksa mencuri ayam karena untuk menebus obat ibunya yang sedang sakit keras di rumah sakit.

2. Teori Utilitarisme

Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti manfaat. Suatu perbuatan dikatakan baik, jika bermanfaat bagi banyak orang, bukan bagi seorang saja. Apakah sesuatu perbuatan itu baik atau tidak dilihat dari manfaatnya bagi orang banyak.

LANJUTAN : Teori Utilitarisme

- Semboyanannya ialah *the greatest happiness for the greatest number*, yaitu kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya.
- Teori utilitarisme cocok dengan prinsip dalam ilmu ekonomi, yaitu menggunakan sumber daya yang langka adanya, untuk dimanfaatkan bagi sebanyak-banyak yang membutuhkannya, atau menggunakan sesuatu untuk sebanyak-banyaknya manfaat.

Teori utilitarisme melihat sesuatu perbuatan bukan pada perbuatannya itu sendiri, melainkan pada akibatnya atau konsekuensinya, yaitu apakah menguntungkan atau memberikan manfaat bagi orang banyak atau tidak. Maka teori utilitarisme dapat juga disebut teori **konsekuensialisme** yang berarti akibatnya, atau teori **teleologisme** yang berarti tujuannya.

Menurut teori utilitarisme, perbuatan yang dimaksud baik, tetapi ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali bagi orang banyak, perbuatan itu tidak dapat dikatakan baik. Jadi yang dilihat bukan perbuatan dan maksudnya, melainkan kenyataan hasilnya.

Teori utiliterisme ini terpecah menjadi dua aliran : a) utilitarisme perbuatan (*act utilitarianism*), dan b) utiliterisme aturan (*rule utilitarianism*). Teori utilitarisme perbuatan hanya melihat pada perbuatan yang tujuannya untuk manfaat bagi orang banyak. Jika ternyata demikian, maka dikatakan baik.

Teori utilitarisme aturan melihat pada aturannya, apakah menurut aturan moral di dalam masyarakat diperbolehkan ataukah tidak. Jika menurut aturan moral di dalam masyarakat hal itu dilarang, meskipun bermanfaat bagi orang banyak, hal itu tidak etis atau tidak baik.

3. Teori Deontologi

Dalam bahasa Yunani, deon artinya kewajiban. Teori ini memberikan argumen, bahwa sesuatu perbuatan adalah baik jika hal itu diwajibkan, dan buruk jika hal itu dilarang. Jadi melihatnya sebagai kewajiban untuk dilakukan dan kewajiban untuk tidak dilakukan. Teori deontologi tidak melihat apakah tujuan dari perbuatan itu baik atau tidak baik, melainkan apakah perbuatan itu sebagai kewajiban untuk dilakukan atau kewajiban untuk tidak dilakukan.

Kewajiban untuk dilakukan atau tidak dilakukan itu dapat berasal dari peraturan negara, masyarakat, atau agama. Misalnya, membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga. Menghormati orangtua adalah kewajiban bagi anak-anaknya. Menghormati pendidik adalah kewajiban peserta didik.

Demikian juga larangan, adalah kewajiban yang tidak boleh dilakukan. Dalam agama orang dilarang berbuat bohong, memfitnah, mengolok-olok orang lain, berbuat keji, dan larang-larangan lainnya. Dalam agama orang diwajibkan untuk bersembayang, untuk menolong orang lain, berbuat kebajikan, menghormati orangtua, dan kewajiban-kewajiban lainnya.

4. Teori Hak

Hak adalah sisi lain dari kewajiban. Tiap hak tentu ada wajibnya, dan tiap wajib ada haknya. Artinya jika kita wajib memberikan sesuatu kepada orang lain, berarti orang lain berhak untuk menerima dari kita. Jadi jika kita melakukan perbuatan untuk memenuhi hak kita, hal itu adalah baik. Jika seorang buruh menuntut dibayar gajinya, hal itu adalah haknya. Tuntutan dibayar gajinya yang sudah waktunya itu adalah perjuangan atas haknya.

Hal itu dilakukan sesuai dengan perjanjian, kapan gaji harus dibayar. Kecuali jika belum waktunya. Jadi, kegiatan atau perbuatan yang dilakukan untuk merealisasi haknya adalah etis. Setiap orang, apakah sebagai perempuan, sebagai pejabat, sebagai manajer, atau sebagai apa saja punya hak yang dikaitkan dengan kedudukannya sebagai manusia dan kedudukannya. Orang jujur itu tidak mau menutup-nutupi kekurangannya.

5. Teori Keutamaan

Keutamaan itu dapat dipandankan dengan yang dalam bahasa Inggris disebut "*virtue*".

C. Tujuan Etika Pendidikan

Etika pendidikan sebagai ilmu atau pelajaran mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk meningkatkan kesadaran kepada semua pihak bahwa dalam pendidikan ada dimensi etisnya.
2. Memperkenalkan bahwa dalam pendidikan ada moral sebagai argumen dalam tindakan.

3. Supaya dilakukan praktek pendidikan yang benar, baik dan etis.
4. Supaya pihak-pihak yang lemah terlindungi dari perbuatan-perbuatan yang tidak etis khususnya bagi peserta didik.
5. Supaya para pendidik tidak melanggar hak-hak peserta didik.
6. Supaya pendidikan berkembang dan hidup dengan baik.

DIMENSI ETIS DALAM PENDIDIKAN

Oleh : Drs. P. Priyoyuwono, M.Pd.
email : petrus_priyoyuwono@uny.ac.id

Pertemuan Ke-3

A. Apa Pendidikan Itu?

HAR Tilaar menyatakan bahwa pendidikan dapat dibedakan dalam bentuk yaitu pendidikan sebagai “benda” dan pendidikan sebagai “proses”.

Oleh karena itu telaah kenyataan pendidikan terbagi dalam tiga wilayah :

1. Pendidikan sebagai suatu lembaga.
2. Pendidikan sebagai suatu proses.
3. Pendidikan sebagai ilmu

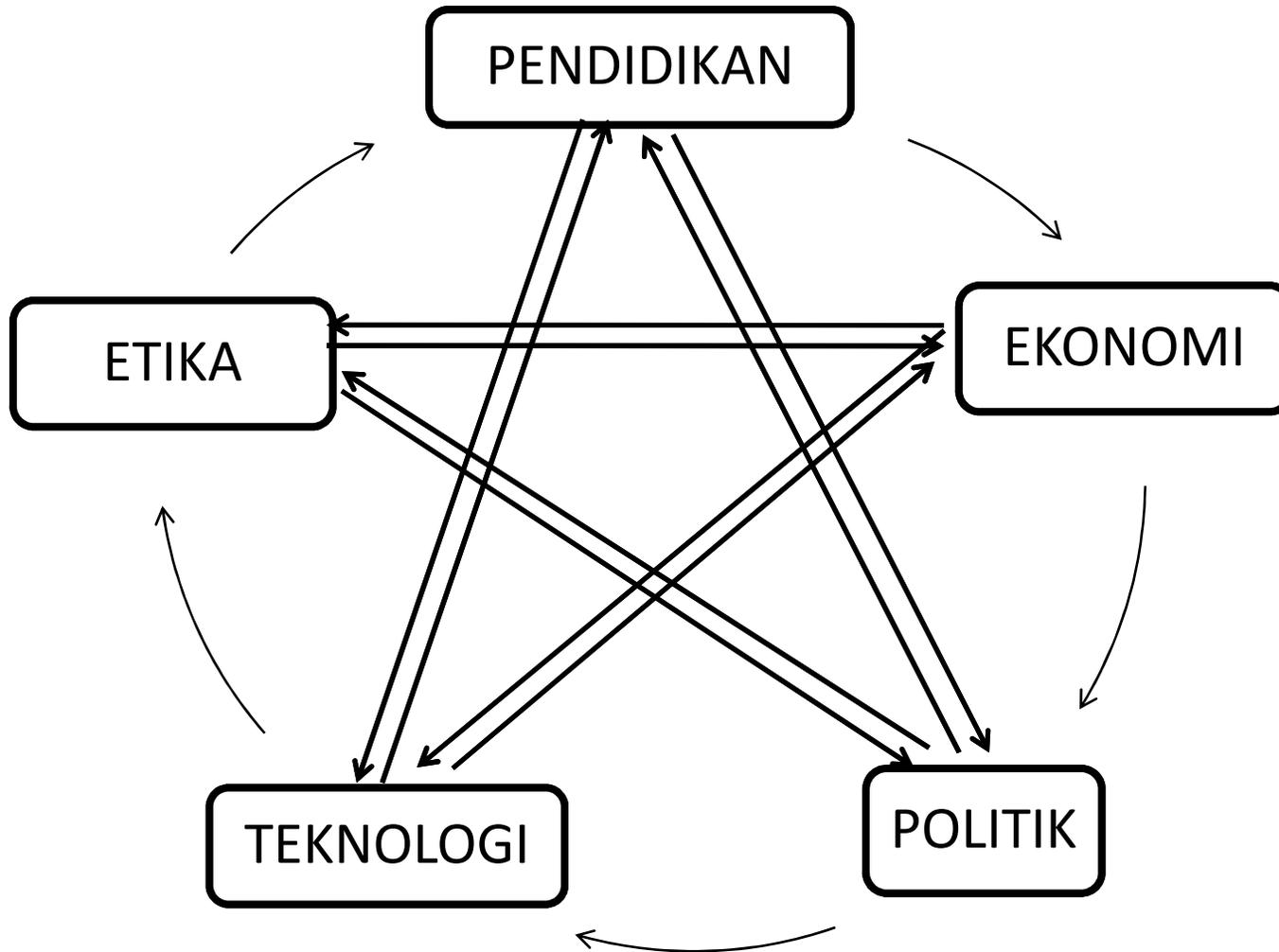
1. Pendidikan sebagai suatu lembaga (Sosial)

Pendidikan berarti juga lembaga yang bertanggung-jawab menetapkan cita-cita (tujuan) pendidikan, isi, sistem dan organisasi pendidikan. Lembaga-lembaga itu meliputi SD-SMP-SMA (Lembaga Pendidikan Formal) keluarga dan masyarakat (Lembaga Pendidikan Non Formal)

a. Pranata Sosial dalam masyarakat :

- 1) Pranata pendidikan / sosialisasi
- 2) Pranata ekonomi / pemenuhan
- 3) Pranata politik / integasi dan status
- 4) Pranata teknologi / inovasi dan
- 5) Pranata moral / etika

Hubungan pengaruh timbal balik antara pranata :



b. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal :

- 1) Pengajaran yang mendidik
- 2) Bimbingan dan konseling
- 3) Pengembangan perpustakaan
- 4) Pengelolaan sekola

2. Pendidikan sebagai suatu proses :

a. Transfer of knowledge, values, skill dan cultural.

b. Good citizen

c. Penyiapan tenaga kerja.

d. Pembentukan kepribadian atau *self forming.*

3. Pendidikan Sebagai Ilmu

Pendidikan sebagai ilmu normatif, merumuskan kaidah-kaidah, norma-norma atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. Atau ilmu yang bertugas merumuskan peraturan tentang tingkah laku perbuatan manusia dalam kehidupan dan penghidupannya.

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yakni rohani (pikiran, karsa, rasa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (pancaindra serta ketrampilan-keterampilan).

B. Peserta didik dan Pendidik

a. Peserta Didik

1) Arti Peserta Didik

- a) Arti luas, peserta didik adalah orang yang mendapat pengaruh.
- b) Arti sempit : anak/pribadi belum dewasa.

2) Karakteristik Peserta Didik :

- a) Individu yang memiliki potensi (fisik dan psikologis) yang khas sehingga merupakan insan yang “unik”.
- b) Individu yang sedang berkembang.
- c) Individu yang butuh bimbingan individual dan perlakuan.
- d) Individu yang punya kemauan untuk memenuhi.

3) Hak Peserta Didik

Setiap peserta didik pada satu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut.

- a) Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- b) Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan;

- c) Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- d) Pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;
- e) Memperoleh penuaian hasil belajarnya;
- f) Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.
- g) Mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

4) Kewajiban Peserta Didik

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b) Mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c) Menghormati tenaga kependidikan;
- d) Ikut memelihara sarana dan prasarana kebersihan, ketertiban, dan keamanan pendidikan yang bersangkutan.

b. Pendidik

1) Arti Pendidik

Pendidik adalah orang dewasa yang mempunyai otoritas dibidang pendidikan

2) Hak Pendidik

- a) Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b) Memperoleh peminaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
- d) Memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;
- e) Menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yanglain dalam melaksanakan tugasnya.

3) Kewajiban Pendidik

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

- a) Membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa;
- c) Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- d) Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa;
- e) Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa, dan negara.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL SEKOLAH

Oleh : Drs. P. Priyoyuwono, M.Pd.
email : petrus_priyoyuwono@uny.ac.id

Pertemuan Ke - 4

A. Konsep Sekolah

Sekolah menurut pengertiannya adalah lembaga penyelenggara kegiatan belajar-mengajar. Suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang sesuai untuk pelaksanaan proses belajar-mengajar. Proses belajar mengajar sendiri dalam pengertian umum sering disebut dengan pendidikan.

Lembaga pendidikannya yang paling representatif secara teoritis adalah sekolah. Alasannya sederhana, di dalam lembaga sekolah segala sesuatu; baik materi yang diajarkan, pengajar, peserta didik, sistem dan metode pengajaran maupun tempat pembelajaran itu sendiri direkayasa sedemikian rupa untuk tujuan pendidikan. Dengan kata lain, sekolah adalah lembaga yang sesungguhnya dari pendidikan.

Perekayasa tersebut disusun dalam bentuk; pendidik dan peserta didik, kurikulum, perjenjangan, metode pengajaran, aturan dan tata tertib sekolah, fasilitas pembelajaran sampai pada gedung tempat pembelajaran itu sendiri. Semua direncanakan dan direkayasa sedemikian rupa dengan tujuan berhasilnya proses pendidikan.

Di samping segala macam unsur-unsur persekolahan tersebut, suatu lembaga sekolah sendiri biasanya memiliki visi dan misi pembelajaran. Visi dan misi pembelajaran pada lembaga pendidikan sekolah inilah yang kelak menjadi penentu perencanaan dan perekayasa lembaga sekolah yang akan dibentuk.

B. Tanggungjawab

Ada tiga macam tanggungjawab ialah :

- a) Tanggungjawab legal,
- b) Tanggungjawab etik, dan
- c) Tanggungjawab kebijaksanaan
(discretionar)

a) Tanggungjawab Legal

Tanggungjawab legal ialah bahawa sekolah melakukan kegiatannya dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuannya masih dalam kerangka hukum yang benar.

b) Tanggungjawab Etik

Tanggungjawab etik ialah bahawa sekolah dalam melakukan perbuatannya menunjukkan keadilan (*equity*), kewajaran (*fairness*), tak memihak (*impartiality*), menghargai hak seseorang, dan hanya memberikan kepada seseorang perbezaan pelayanan apabila hal itu relevan dengan tujuan dan tugas organisasi. Dikatakan tidak etis apabila keputusannya hanya mengutungkan seseorang atau organisasi, tetapi atas pengorbanan masyarakatnya.

c) Tanggungjawab Kebijaksanaan (*discretionary*)

Tanggungjawab kebijaksanaan adalah kriteria tertinggi, karena hal ini di luar apa yang diharapkan, yaitu memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakatnya.

C. Tanggungjawab sosial itu dapat ditunjukkan oleh sekolah

1. Mengambil tindakan koreksi sebelum diminta, jika terjadi kesalahan.
2. Bekerja dengan konstituen untuk memecahkan masalah bersama.
3. Bekerja untuk mewujudkan standar pendidikan yang luas dan aturan sendiri.
4. Secara publik mengakui kesalahannya.

D. Perilaku Etis

Perilaku sekolah dikatakan etis apabila sekolah itu berlaku :

1. Jujur (*houest*) tidak dusta atau bohong.
2. Memelihara keyakinan dan dapat dipercaya (*confidence and trust*).
3. Mengikuti aturan yang berlaku.

LANJUTAN Perilaku Etis

1. Sopan secara wajar.
2. Memperlakukan pihak lain secara wajar.
3. Menunjukkan kesetiaan kepada organisasi dan teman-temannya.
4. Berpartisipasi, bekerja dan bertanggung jawab 100% dalam bidangnya.

PENDIDIKAN DAN KEADILAN

Oleh : Drs. P. Priyoyuwono, M.Pd.
email : petrus_priyoyuwono@uny.ac.id

Pertemuan Ke - 5

A. Definisi Keadilan

Keadilan ialah yang dalam bahasa Latin ***“tribuere cuique suum”***, yang dalam bahasa Inggrisnya ***“to give everybody his own”***, yang dalam bahasa Indonesia secara harafiah ialah “memberikan kepada setiap orang miliknya”, dan lebih tepat jika diterjemahkan dengan **“memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya”**.

B. Tiga Ciri Tanda-Tanda Keadilan

1. Keadilan itu tertuju kepada orang lain
2. Ada pelaksanaannya
3. Ada kesamaan (*equality*), artinya yang diberikan itu sama dengan haknya, atau jika orang lain itu banyak, maka yang diberikan itu sama kualitas dan kualitasnya.

C. Jenis-Jenis Keadilan

1. Menurut Zaman Klasik

- a. Keadilan umum (*general justice*)
- b. Keadilan distributif (*distributive justice*),
- c. Keadilan komutatif (*commutative justice*),

Keadilan Umum (*General Justice*)

Yaitu kesamaan bagi tiap orang (warga) untuk memberikan kontribusinya kepada masyarakat (negara) yang sama, untuk kepentingan bersama, seperti membayar pajak, siskamling, membela Negara, wajib militer, dan sebagainya. Ini merupakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, yang harus dibagi sama bagi semuanya.

Keadilan distributif (*distributive justice*)

Yaitu apa yang dibagi oleh pemerintah atau negara kepada warganya atau anggota masyarakat harus sama. Ini adalah keadilan membagi, baik yang dirasakan sebagai hal yang enak maupun sebagai beban, *benefit and burden* dibagi sama.

Keadilan komutatif

(commutative justice)

yaitu keadilan di antara sesama anggota masyarakat atau sesama warga. Hal ini berlaku terutama dalam hal tukar menukar, tolong menolong, pinjam meminjam, atau transaksi sosial lainnya di antara sesama para warga.

2. Menurut zaman modern :

- a. Keadilan distributif**, yaitu sama seperti yang telah disebutkan di atas.
- b. Keadilan retributif (*retributive justice*)**, yaitu keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan, bahwa denda atau hukuman kepada yang bersalah harus adil. Dalam hal ini harus seimbang dengan kesalahannya.

c. Keadilan Kompensatoris

Keadilan Kompensatoris (*compensatory justice*), yaitu pemberian penggantian kepada pihak lain yang dirugikan, yang harus seimbang dengan kerugian atau kerusakan yang diakibatkan. Jika kita merusakkan sepeda-motor orang lain misalnya, yang untuk perbaikan itu biayanya hanya Rp 25.000, - tetapi kita harus mengganti kerugian sebesar Rp 100.000,- ini tidak adil, karena tidak seimbang dengan kerugiannya atau kerusakannya.

D. Keadilan Sosial dan Keadilan Individual

Keadilan sosial ialah keadilan dilihat dari sudut kepentingan sosial atau kepentingan masyarakat secara keseluruhannya, apakah yang diterima atau dibebankan kepada atau diterima oleh seseorang, atau diterima atau dibebankan kepada seluruh anggota masyarakat, asal hal itu menurut pendapat masyarakat adalah adil, maka hal itu dapat dikatakan sebagai keadilan sosial.

Lanjutan :

Keadilan Sosial dan Keadilan Individual

- Keadilan individual ialah dilihat dari sudut kepentingan seseorang saja. Jika seseorang merasakan bahwa apa yang ia terima atau diberikan kepada pihak lain menurut pendapatnya adalah adil, maka hal itu adalah sebagai keadilan individual.

Dalam praktik keadilan sosial dan keadilan individual tidak harus sama, tetapi dapat berbeda. Yang menurut masyarakat dipandang adil atau sebagai keadilan sosial, sedangkan oleh seseorang dipandang tidak adil, atau sebaliknya.

Jenis-jenis Keadilan Distributif

Membagi secara adil tidak mudah. Hal ini karena adanya berbagai kepentingan. Secara formal yang disebut adil dalam membagi ialah *“equals ought to be treated equally and unequal may be treated unequally”* (sesuatu yang sama harus diperlakukan sama dan yang tidak sama dapat diperlakukan tidak sama).

Yang disebut “sama” (*equal*) itu dapat mengenai orang, kedudukan, peristiwa, atau lainnya. Ini pada prinsipnya secara formal. Jika tidak sama (*unequals*), juga diperlakukan tidak sama. Jika ada perlakuan yang tidak sama haruslah ada perbedaannya. Ini disebut prinsip material, ditentukan atas dasar adanya perbedaan.

Mengingat adanya perbedaan-perbedaan itu, maka keadilan dapat dalam bentuk pemberian:

1. Bagian yang sama bagi setiap orang
2. Menurut kebutuhan seseorang
3. Menurut hak seseorang
4. Menurut usaha seseorang
5. Menurut kontribusinya kepada masyarakat.
6. Menurut jasanya.
7. Menurut usia seseorang
8. Menurut senioritas seseorang.

Atas dasar adanya keadilan dalam membagi itu timbul berbagai teori untuk memberikan justifikasinya.

Beberapa teori yang bertalian dengan keadilan membagi seperti tersebut di atas ialah :

Teori Egalitarisme

Teori egalitarisme membela pendapatnya bahwa kepada harus ada pembagian yang sama bagi setiap orang. “Sama rata sama rasa” adalah semboyannya. Alasannya ialah bahwa “*All men are ceated equal*”, hal ini disebabkan manusia mempunyai martabat yang sama. Semboyan lainnya ialah “equal before the law” one man one vote”

Teori Egalitarisme

Jadi, teori ini hanya dapat diterapkan dalam beberapa bidang saja, misalnya hanya dalam bidang hukum (di depan pengadilan) dan politik (pemilihan umum) saja. Dalam bidang ekonomi dan bisnis, tidak dapat diterapkan dalam semua aspeknya.

Teori Sosialistis

Teori ini mendasarkan keadilan **pembagian atas kebutuhan** seseorang. Yang dibagikan tidak harus sama, melainkan menurut kebutuhannya. Pendukung teori ini ialah Louis Blanck (1811-1882) dengan teori sosialisme utopis, dan Karl Marx (1818-1883) dengan teori sosialisme ilmiahnya, dan terkenal dengan semboyannya "*from each according to his ability, to each according to his needs*". Kalimat ini terdiri atas dua bagian, yang pertama (sebelum koma), dan yang kedua (sesudah koma). Bagian pertama membicarakan pembagian beban (*burden*), sedangkan bagian kedua membicarakan pembagian keenakan atau keuntungan (*benefit*). *Burden* harus dibagi menurut kemampuan (*ability*) sedangkan *benefit* harus dibagi menurut kebutuhan (*needs*).

Teori Egalitarisme

Teori ini hanya berlaku dilihat dari kesamaan martabat manusia, sedangkan dalam kenyataannya, menurut situasi dan kondisinya, manusia itu mempunyai perbedaan-perbedaan yang bukan karena martabatnya. Apalagi adanya ciri-ciri lain selain martabat manusia, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang timbul atau terjadi sesudah lahir.

Misalnya, orang yang cacad memiliki kemampuan yang kurang idbandingkan dengan orang yang utuh. Kemampuannya pasti beda. Jadi, kalau diberi beban juga harus beda, bedanya ialah karena beda kemampuannya; demikian juga jika diberi pembagian yang mengenakan juga harus beda, bedanya ialah menurut kebutuhannya. Apa kemampuan mereka yang cacad, dan apa kebutuhan mereka yang utuh (tidak cacad). Apa kebutuhan mereka yang cacad, dan apa kebutuhan mereka yang utuh (tidak cacad); pasti beda.

Inilah dasar etika menurut teori sosialis tentang keadilan distributif. Teori ini meskipun dipandang etis, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Misalnya gaji harus menurut kebutuhannya, padahal kemampuannya tidak sama. Jika ada di antara mereka yang kemampuannya kecil, tetapi kebutuhannya besar, lalu diberi gaji besar, kemudian dibandingkan dengan mereka yang kemampuannya besar, tetapi kebutuhannya kecil, diberi gaji kecil, hal itu menurut teori sosialisme adalah adil.

Teori sosialisme seperti ini sulit diterapkan meskipun kelihatannya etis, karena atas pertimbangan-pertimbangan lain akan dirasakan juga adanya ketidak-adilan. Apalagi yang disebut sebagai kebutuhan itu sulit diketahui, karena tersimpan di dalam batin seseorang.

Teori Liberalistis

Menurut teori liberalisme pembagian atas dasar kebutuhan itu justru tidak adil. Hal ini disebabkan bahwa manusia itu memiliki kebebasan. Dikatakan adil apabila pembagian itu menurut usahanya sendiri dari individu yang bersangkutan. Mereka yang tidak berusaha tidak boleh menerima sesuatu. Sesuatu itu diberikannya karena menurut dan seimbang dengan usahanya. Jadi, pembagian itu adalah atas dasar usahanya, prestasinya jasanya, dan paling-paling ialah atas haknya. Teori ini tidak menyetujui adanya *free rider* (penumpang bebas), yaitu mereka yang memperoleh sesuatu padahal sama sekali tidak ada jasanya, usahanya, prestasinya, atau haknya.

Yang menjadi naskah dalam keadilan distribusi ini ialah bagaimanakah mereka yang karena kodratnya tidak dapat berusaha, seperti tidak ada kesempatan berprestasi karena tidak memperoleh pekerjaan, cacat semenjak lahir, tidak mampu karena kecelakaan, dan lain sebagainya di luar kemampuannya. Apakah kepada mereka yang seperti ini jika tidak diberi pembagian dapat dikatakan adil? Jadi, teori liberalisme tentang keadilan distribusi juga menghadapi kesulitan dalam penerapannya. Maka teori John Rawls berikut ingin memberi penjelasan bagaimana supaya teori liberalisme itu dapat diterapkan.

Teori John Rawls

Menurut John Rawls, pada prinsipnya kita harus membagi rata, kecuali ada alasan lain. Alasan itu harus yang masuk akal, yaitu apa yang membedakan di antara yang harus menerima pembagian itu, yaitu menurut kodratnya, misalnya dilahirkan dari orangtua miskin, dilahirkan menjadi orang sakit-sakitan, dan sebaliknya dilahirkan dari orangtua yang kaya raya, dilahirkan sebagai anak yang berinteligensia tinggi atau rendah, sebagai laki-laki atau perempuan, dan sebagainya. Ini semua ada di luar kekuasaan manusia, yang oleh John Rawls disebut *natural lottery*. Sesudah adanya lotere alamiah ini baru kita bicara tentang keadilan, khususnya tentang keadilan distributif. Yang harus kita bagi secara adil ialah nilai-nilai (sumberdaya) sosial yang utama (*the social primary goods*).

Bagaimana membaginya secara adil? Caranya ialah menurut prosedur yang oleh semua orang dapat diterima sebagai cara yang adil, yang ia sebut *fairness*. *Fairness* dalam hal ini yang adil, yang ia sebut *fairness*. *Fairness* dalam hal ini yang artinya ialah membagi yang prosedurnya adil atau wajar. Rawls memberi contoh dalam membagi sebuah kue (tart) untuk 20 orang. Bagaimana supaya adil? Kita tunjuk satu orang untuk memotong kue itu menjadi 20 potong dalam potongan yang sama. Peserta yang harus memperoleh satu potong dari kue itu boleh mengambil mana yang ia sukai, atas dasar undian, tetapi orang yang memotong kue baru boleh mengambil sebagai yang terakhir.

Dalam membagi *the social common goods* itu ia menggunakan dua prinsip :

Prinsip pertama : setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas yang dapat dicocokkan dengan kebebasan-kebebasan yang sejenis untuk semua orang. Ini adalah prinsip “hak kebebasan yang sedapat mungkin sama”.

Prinsip kedua : ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga :

- a) Menguntungkan terutama orang-orang yang minimal beruntung, dan sekaligus juga.
- b) Melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka bagi semua orang dalam keadaan yang menjamin persamaan peluang yang *fair*. Ini adalah prinsip perbedaan.

Entitlement Theory menurut Robert Nozick

Menurut Nozick kita memiliki sesuatu dengan adil, jika kepemilikan itu berasal dari keputusan bebas yang mempunyai landasan hak. Ada tiga prinsip sebagai landasannya :

- 1) Prinsip *original acquisition*, misalnya diperoleh dari kerja.
- 2) Prinsip *transfer*, misalnya dari pertukaran atau membeli.
- 3) Prinsip *rectification*, kita mendapatkan kembali sesuatu yang sebelumnya hilang, dicuri orang, atau dipinjam oleh orang.

PENGANTAR

ETIKA PENDIDIKAN

Oleh : Drs. P. Priyoyuwono, M.Pd.
email : petrus_priyoyuwono@uny.ac.id

Pertemuan 6

EDUCATION ETHICS : A GLOBAL FRAMEWORK

Ethical issues dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori umum, yaitu :

1. Bribery (suap)

Merupakan tindakan berupa menawarkan, memberi, menerima, atau meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seorang pejabat dalam melaksanakan kewajiban publik. Suap dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dengan membeli pengaruh. 'Pembelian' itu dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang atau barang, maupun 'pembayaran kembali' setelah deal terlaksana.

Suap kadangkala tidak mudah dikenali. Pemberian cash atau penggunaan callgirls dapat dengan mudah dimasukkan sebagai cara suap, tetapi pemberian hadiah (gift) tidak selalu dapat disebut sebagai suap, tergantung dari maksud dan respons yang diharapkan oleh pemberi hadiah.

2. Coercion (paksaan)

Merupakan tekanan, batasan, dorongan dengan paksa atau dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Coercion dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan, pemecahan, atau penolakan terhadap seorang individu.

3. Deception (penipuan)

Merupakan tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan atau melakukan kebohongan.

4. Theft (pencurian)

Merupakan tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil property milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Properti tersebut dapat berupa property fisik atau konseptual.

5. Unfair discrimination

Merupakan perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu yang disebabkan oleh ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau agama..... Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan sama (setara) tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang 'disukai' dan tidak.

THE IMPORTANCE OF ETHIC IN EDUCATION

Perilaku etis penting diperlukan untuk sukses jangka panjang dalam sebuah proses pendidikan. Pentingnya etika pendidikan tersebut berlaku untuk kedua perspektif baik lingkup makro ataupun mikro, yang akan dijelaskan dalam bab dua ini.

1. Perspektif Makro

Pertumbuhan suatu negara tergantung pada market system yang berperan lebih efektif dan efisien sekolah (*school system*) dalam mengalokasikan pendidikan dan sekolah.

Beberapa kondisi yang diperlukan market system untuk dapat efektif :

- a. Hak memiliki dan mengelola sekolah swasta.
- b. Kebebasan memilih KBM
- c. Ketersediaan informasi yang akurat.

Jika salah satu subsistem dalam market system melakukan perilaku yang tidak etis, maka hal ini akan mempengaruhi keseimbangan sistem dan mengambat pertumbuhan sistem secara makro.

Pengaruh dari perilaku tidak etis pada perspektif makro :

a. Penyogokan atau suap

Hal ini akan mengakibatkan berkurangnya kebebasan memilih dengan cara mengubah kondisi yang mendasari pengambilan keputusan.

a. Coercive act (paksaan)

Mengurangi kompetisi yang efektif antara pelaku pendidikan dengan ancaman atau memaksa untuk tidak berhubungan dengan pihak lain.

a. Deceptive information

b. Pencurian dan penggelapan

c. Unfair discrimination

2. Perspektif Mikro

Dalam lingkup ini perilaku etis identik dengan kepercayaan atau trust. Dalam lingkup mikro terdapat rantai relasi dimana orangtua sekolah masyarakat dan kepentingan, konsumen karyawan saling berhubungan kegiatan pendidik yang akan berpengaruh pada lingkup makro. Tiap mata rantai penting dampaknya untuk selalu menjaga etika sehingga kepercayaan yang mendasari hubungan edukatif dapat terjaga dengan baik.

MORAL STANDARDS

Standar moral merupakan tolok ukur etika pendidikan. Dimensi etis merupakan dasar kajian dalam pengambilan keputusan. Etika pendidik yang berfokus pada etika terapan daripada etika normatif. Dua prinsip yang dapat digunakan sebagai acuan dimensi etis dalam pengambilan keputusan yaitu :

1. Prinsip Consequentialist

Konsep etika yang berfokus pada konsekuensi pengambilan keputusan. Artinya ialah keputusan dinilai etis atau tidak berdasarkan konsekuensi (dampak) keputusan tersebut.

2. Prinsip Nonconsequentialist

Terdiri dari rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk/panduan pengambilan keputusan etis dan berdasarkan alasan bukan akibat (konsekuensi).

a. Prinsip Hak

Menjamin hak asasi manusia. Hak ini berhubungan dengan kewajiban untuk tidak saling melanggar hak orang lain.

b. Prinsip Keadilan

Keadilan biasanya terkait dengan isu hak, kejujuran, dan kesamaan.

Prinsip keadilan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. Keadilan distributif

Keadilan yang sifatnya menyeimbangkan alokasi *benefit* dan beban antar anggota kelompok. *Benefiti* terdiri dari pendapatan, pekerjaan, kesejahteraan, pendidikan dan waktu luang. Beban terdiri dari tugas kerja, pajak dan kewajiban sosial.

2. Keadilan retributif

Keadilan yang berkaitan dengan *retribution* (ganti rugi) dan hukuman atas kesalahan tindakan. Seseorang bertanggungjawab atas konsekuensi negatif atas tindakan yang dilakukan kecuali tindakan tersebut dilakukan atas paksaan pihak lain.

3. Keadilan kompensatoris

Keadilan yang terkait dengan kompensasi bagi pihak yang dirugikan. Kompensasi yang diterima dapat berupa perlakuan medis, pelayanan dan barang penebus kerugian. Masalah terjadi apabila kompensasi tidak dapat menebus kerugian, misalnya kehilangan nyawa manusia.

THE EMPIRICAL EVIDENCE

Riset empiris dalam rangka memahami masalah etika dalam lingkungan pendidikan sebagian besar dilakukan dengan cara survei. Hasil riset tersebut sangat tergantung oleh pertanyaan dalam kuesioner dan sampel pada riset tersebut. Secara garis besar, kajian dalam riset etika tersebut adalah karakter pribadi, karakter sekolah dan pengambilan keputusan.

Karakter Pribadi

Kajian karakter pribadi dibatasi pada nilai pribadi, tingkat perkembangan moral dan karakter demografi yang dipilih. Nilai pribadi sangat mempengaruhi perilaku etis.

Karakter Sekolah

Riset etika pendidikan sebagian besar berfokus pada beberapa hal yaitu iklim sekolah, tujuan sekolah dan investigasi *stakeholder*. Salah satu ukuran yang digunakan dalam mengevaluasi etika sekolah adalah out cand. Pesan yang disampaikan melalui out put mempunyai pengaruh signifikan terhadap nama baik sekolah.

Pemahaman iklim sekolah juga dapat memberikan petunjuk mengenai perilaku individu yang sesuai untuk mencapai tujuan sekolah. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku etis adalah sebagai berikut :

1. Tekanan kepala sekolah terhadap pendidik yang menyangkut perintah melanggar aturan.
2. Pengaruh rekan kerja, atasan dan pasangan perkawinan.
3. Sistem informal dalam sekolah.
4. Kondisi kritis sekolah.

Pengambilan Keputusan

Dimensi etika dipengaruhi oleh jenis masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, sebagai contoh adalah kepala sekolah menghadapi permasalahan etika yang berbeda dengan pendidik karena bidang yang dihadapi juga berbeda.

Harvard Business Review memaparkan bahwa kepala sekolah lebih berpeluang untuk melakukan tindakan melanggar etika. Hasil riset Chonko dan Hunt menyatakan bahwa faktor utama terjadinya masalah etika oleh manajer pemasaran adalah tuntutan untuk menyeimbangkan antara target penjualan perusahaan dengan kebutuhan customer.

ETHICS AND DECISION MAKING

1. Personal Traits

Etika seseorang dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti :

- Personal Values

value -> kepercayaan yang menjadi dasar seseorang bersikap. Ethical values -> keyakinan preskriptif mengenai yang benar dan yang salah.

Jenis vales ada 2, yakni *instrumental* (konsepsi mengenai cara bertingkah laku yang diinginkan yang instrumental dalam pencapaian

MAKING MORAL DECISION

Kondisi yang diperlukan untuk memasukkan etika kedalam pengambilan keputusan, yaitu (1) kultur organisasional harus mendukung pembuatan keputusan etis (2) manajer harus memiliki alat (*ethics tools*) untuk melakukan evaluasi terhadap dimensi etika dari suatu keputusan.

1) Kultur organisasional (Chp 5) adalah kumpulan dasar-dasar asumsi, kepercayaan dan nilai yang dibentuk didalam organisasi yang mencakup baik lingkungan internal maupun eksternal. Menurut Kotter & Heskett, ada 2 level kultur sekolah, yaitu (a) mencakup nilai-nilai yang di *share* oleh anggota organisasi, (b) mencakup norma-norma yang dijadikan pedoman perilaku anggota organisasi dalam aktivitas sehari-hari. *High-performing cultures* pasti mempromosikan perilaku etis. Kultur yang mendukung perilaku etis akan memotivasi pimpinan untuk menghasilkan alat-alat keputusan yang diinginkan.

2) Ada 3 level dimensi keputusan yaitu *unacceptable*, *marginally acceptable*, dan *acceptable*. Sebelum membuat suatu keputusan, manajer mengumpulkan informasi mengenai suatu masalah dan alternatif yang dipertimbangkan, untuk itu digunakan *decision support model*. Dari model tersebut dapat ditentukan apakah keputusan tersebut *unacceptable*, *marginally acceptable* atau *acceptable*. *Ethics tools* dapat dibentuk melalui program pelatihan ataupun *self-study*.

Perubahan kultur yang signifikan membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tiada jaminan keinginan tersebut dapat berpengaruh. Menurut Kotter & Heskett, untuk berubah secara sukses menjadi *performance-enhancing culture*, seorang manajer harus menemukan yang memiliki 3 karakteristik, yaitu (a) pemimpin yang efektif (b) memiliki perspektif *outsider* (c) memiliki *insider's resources*.

